

KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

23 Mei 2023

Metropolis

Pemkot Mataram Harus Selesaikan Rekomendasi BPK dalam 60 Hari

Editor: Redaksi Lombok Post  23 Mei 2023



DIPERTAHANKAN YA: Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menandatangani komitmen bersama percepatan peningkatan opini dan mempertahankan opini WTP di Kantor BPK Perwakilan NTB, Jumat (12/5). (Diskominfotik Kota Mataram for Lombok Post)

MATARAM-Pemerintah Kota Mataram mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB untuk LKPD tahun 2022. Meski demikian, ada sejumlah temuan yang kemudian direkomendasi BPK RI yang mesti ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari.

Beberapa temuan yang menjadi rekomendasi BPK diantaranya terkait kelebihan pembayaran honorarium, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pengelolaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS), hingga masalah pembayaran obat atau pelayanan kesehatan di rumah sakit.

“Kalau itu (honorarium dan SPPD) berkaitan dengan kepatuhan dalam Penerapan Perpres Nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional,” jelas Inspektur Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati.

Terkait persoalan ini, Pemkot Mataram dan kabupaten kota lain yang ada di Indonesia memang sudah diberikan peringatan dari tahun sebelumnya. Nelly menyampaikan ada beberapa hal yang berbeda antara pemahaman Pemkot Mataram dengan BPK terkait Perpres. “Sehingga ada beberapa yang kami sepaham melebihi perpres harus disetor, kalau melebihi standar itu dikembalikan (ke kas daerah). Ada juga beberapa yang memang masih bisa dikategorikan inefisien,” paparnya.

Sebagai contoh, pemahaman Pemkot Mataram wakil wali kota masuk dapat jajaran Forkopimda. Sehingga ketika ada kegiatan tertentu, otomatis diberikan honorarium, SPPD, atau biaya rapat di luar kantor dalam menjalankan tugasnya. Sementara dalam penjelasan BPK, Forkopimda hanya wali kota. Begitu juga dengan pimpinan DPRD Kota Mataram itu hanya ketua dewan. Bukan wakil ketua. Ini yang kemudian terjadi perbedaan pemahaman.

Untuk itu, Pemkot Mataram juga dikatakannya akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Kaitannya dengan persoalan rekomendasi BPK atas LHP LKPD tahun 2022. Itu juga telah dibahas bersama Plt Sekda. “Kami akan membuat surat lengkap wali kota terkait hasil temuan BPK ke Kementerian Keuangan,” lanjutnya.

Kemudian ada juga persoalan mengenai dana BOS hingga beberapa rekomendasi lainnya dikatakannya akan ditindak lanjuti dalam waktu 60 hari. “Harus selesai dalam 60 hari setelah menerima LHP. Tetapi kalau secara aturan, ada yang masuk kategori 60 hari ada juga yang bisa masuk kategori SKTJM sampai dua tahun (penyelesaiannya),” papar mantan Kepala BKPSDM Kota Mataram tersebut.

Nelly juga memaparkan terkait pihak yang terlibat nanti, meskipun sudah pensiun atau pindah ke OPD lain mereka akan tetap bertanggung jawab jika terkait dengan rekomendasi BPK. Karena pertanggungjawaban berkaitan dengan objek yang ada di dalam temuan.

“Tapi kita bersyukur temuan tahun 2022 jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya. Penyetoran tahun kemarin juga hampir 90 persen sudah disetor,” urainya.

Kepala BPK RI Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana kepada Lombok Post menjelaskan secara umum temuan BPK atas LKPD kabupaten kota tahun ini menyangkut perangkat lunak atau sistem dan pihak yang ada di dalam sistem.

“Ada yang prosedurnya sudah bagus tetapi memang ada masalah kepatuhan orangnya. Ada juga yang memang perangkatnya belum bagus sehingga kami rekomendasikan untuk membuat sistem yang lebih bagus dengan kendali internal yang lebih baik,” jelasnya.

Terkait masih adanya temuan oknum yang tidak mematuhi aturan atau berlaku tidak sewajarnya, ini menurutnya berkaitan erat dengan karakter manusia. Baik di instansi pemerintah, sekolah atau di layanan kesehatan seperti rumah sakit. BPK menemukan masih ada praktek di rumah sakit yang tidak baik di dalam memberikan insentif pada tenaga kesehatan.

“Kemudian mengutip dari pembayaran obat, itu menjadi catatan kami. Kalau memang belum dikembalikan kelebihan pembayaran itu menjadi rekomendasi kami,” paparnya.

Namun untuk Kota Mataram, ia menyampaikan secara umum tindaklanjut yang dilakukan atas rekomendasi BPK tergolong baik. Sebagian besar sudah melakukan recovery untuk pengembalian ke kas daerah. “RSUD Kota Mataram sudah cukup bagus,” kata dia.

Namun tidak menutup kemungkinan apa yang menjadi temuan dan rekomendasi BPK di RSUD Kota Mataram juga masih terjadi di rumah sakit lainnya. Maka ia memita semua kabupaten kota termasuk rumah sakit daerah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dengan cepat. “Dalam 60 hari akan kami pantau bagaimana perkembangannya nanti,” tandasnya. (ton/r3)